



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini dapat tersusun. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2022

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara disusun dengan mengacu pada Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2022. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala

Abdul Majid Ode, S.H

NIP. 197701292003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Visi,Misi dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sumber Daya Manusia.....	7
F. Sasaran Strategis Balai Diklat Sulut.....	10
G. Sistematika Laporan.....	11
A. Rencana Strategis (RENSTRA).....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja.....	18
B. Analisa Capaian Indikator Kinerja	19
C. Kendala/Hambatan.....	22
D. Analisa Efisiensi	22
E. Capaian Realisasi Anggaran Badiklat Hukum dan HAM Sulut Tahun 2022.....	23
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan.....	26
Rencana Tindak Lanjut.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi /instansi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara di masa mendatang.



B. Visi, Misi, dan Tujuan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, BPSDM Hukum dan HAM melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian tersebut, khususnya dalam berbagai aspek penyiapan dan



pengembangan SDM aparatur.

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk; mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang



berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.



C. Tugas dan Fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas:

Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang diamanahkan serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka terlihat jelas indikasi bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia aparatur bidang Hukum dan



HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdiri dari :

- 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
- 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 1 (satu) orang Kepala Seksi Penyelenggaraan
- 1 (satu) Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badiklat Hukum dan HAM terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



E. Sumber Daya Manusia

Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 12 orang dengan berbagai latar belakang dan Pendidikan yang berbeda. Berikut Daftar nama-nama pegawai Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara :

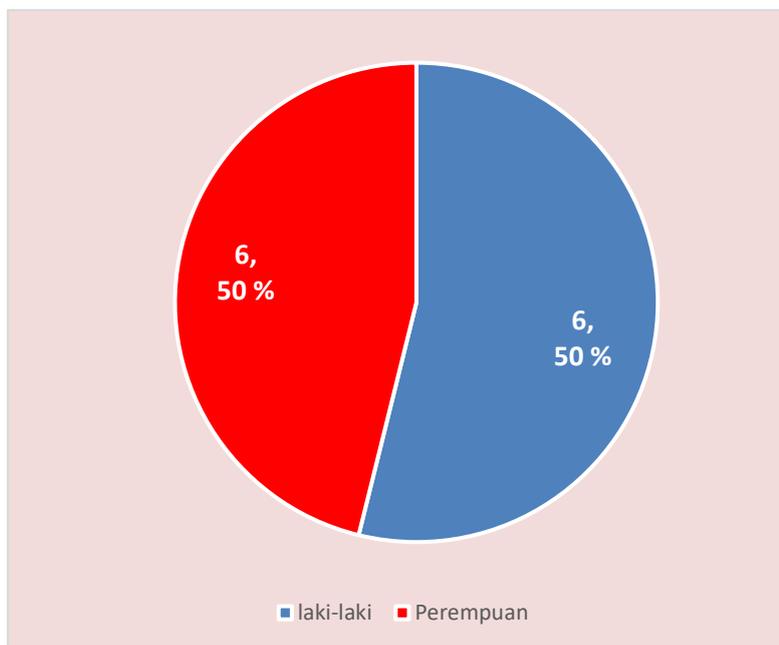


Tabel 1 Daftar Pegawai

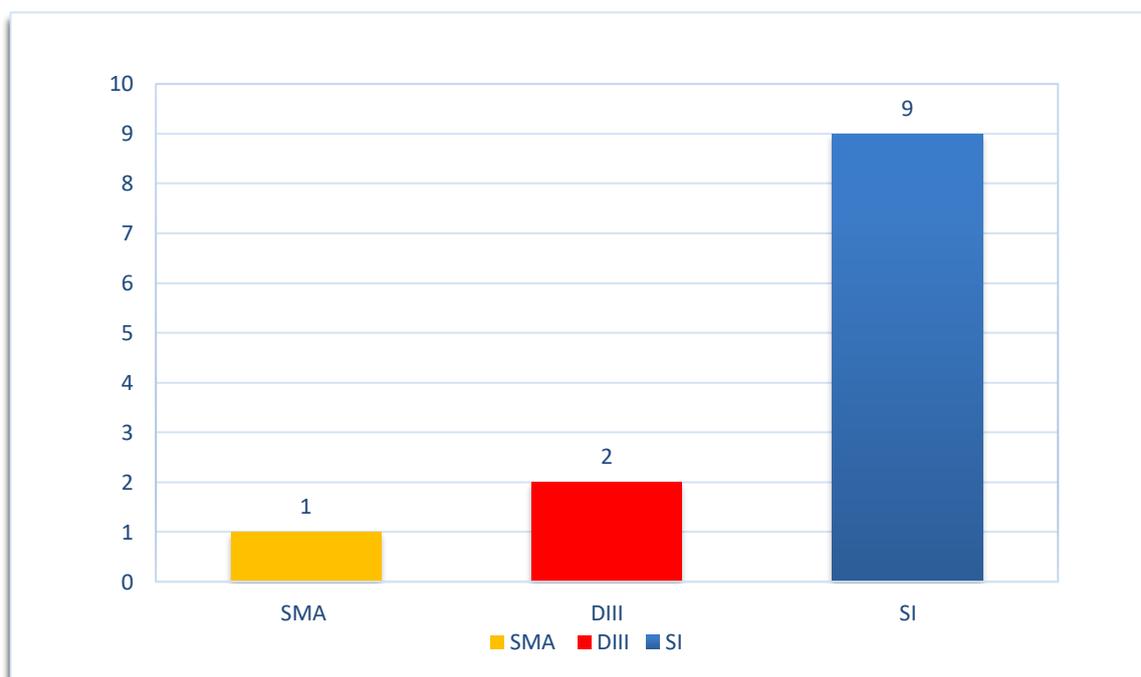
NO	NAMA SATKER	JABATAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN			GOLONGAN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	S1	DIII	SLT A	IV	III	II
1	Abdul Majid Ode, S.H. NIP. 197701292003121002	Kepala Seksi Penyelenggaraan	√		√				√	
2	Fetty H Wantania, S.Kom. NIP. 198305022009012003	Kepala Seksi Program dan Evaluasi		√	√				√	
3	Musa Paparang, S.E. NIP. 197808222010121001	Kepala Subbagian Tata Usaha	√		√				√	
4	Margrison, S.H. NIP. 198503312006041001	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	√		√				√	
5	Mohamad Zainudin, S.S. NIP. 198210242009011004	Pengelola Data Kepegawaian	√		√				√	
6	Wahyuni Sasto, S.H. NIP. 198902072008012001	Pengevaluasian Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran		√	√				√	
7	Tika Indriyani, S.H. NIP. 199508282019012001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama		√	√				√	
8	Een Laberma, S.H. NIP. 199108312019061001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	√		√				√	
9	Caecilia Marie Avelyn, S.E. NIP. 198810222020122001	Penata Keuangan		√	√				√	
10	Robert R.A Tumengkol NIP. 198408152010121002	Bendahara Pengeluaran	√				√			√
11	Janitra D. Permata, A.Md.Ak. NIP. 199509162019012001	Pengelola Tata Naskah		√		√				√
12	Try Ervina, A.Md.Ak. NIP. 199303312021012001	Pranata Laporan Keuangan		√		√				√
TOTAL			6	6	9	2	1	1	9	3



Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





F. Sasaran Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri menyatakan bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis BPSDM Hukum dan HAM berperan penting dalam hal pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM diwilayah berdasarkan amanah yang diberikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan diwilayah.

Pengembangan kompetensi SDM apartur sipil negara di era saat ini bukan hanya didapatkan melalui pelatihan secara konvensional tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi.

Untuk menjawab tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas, program-program yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM diwilayah kerja Badiklat Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu mendukung kinerja organisasi.

G. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsidan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini bersisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2022 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya;

Bab IV Penutup

Menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2021 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kemenkumham menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut

Tabel 2 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
Pemangku Kepentingan	Sasaran Strategis 1 (SS1): Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundangundangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2): Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Sasaran Strategis 3 (SS3): Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum



Perspektif Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 4 (SS4): Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase mantan narapidan yang terampil dan bersertifikat 4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
	Sasaran Strategis 5 (SS5): Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase penegakkan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6): Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembelajara dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7): Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8): Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi



	Sasaran Strategis 9 (SS9): Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategis 10 (SS10): Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Sasaran Strategis 11 (SS11): Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA

Seperti yang tertuang dalam tabel diatas, salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University. Arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis (Renstra) Balai Diklat Hukum dan HAM merupakan turunan dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024. Sasaran Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard, yaitu :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan



2. Perspektif Proses Internal

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran. Sasaran strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 15 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Perspektif Sasaran Strategis2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan



	terakreditasi 3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terkareditasi 2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran 3. Menjalin kerjasama sinergitas
Keuangan atau Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja atas apa yang menjadi sasaran strategis demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan. Dokumen Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
Meningkatkan Kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90 %	
B A B I I A R K	Sasaran Program Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indikator Kinerja Program 1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92 %
	2. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92 %	
Sasaran Strategis Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah	Target 90 %	



UNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang wajib disampaikan kepada pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.



A. Capaian Kinerja

Berikut output hasil capaian kinerja selama tahun 2022 sesuai dengan sasaran program, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan BPSDM Hukum dan HAM kepada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara :

Tabel 5 Hasil Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Output kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Capaian			Anggaran		
		Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	% kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	90 %	93 %	103 %	15.268.385.000	15.125.293.599	99.06
Layanan Perkantoran Balai Diklat Hukum dan HAM	% Realisasi pembayarangaji dan tunjangan	95	100	105	821,494,000	800,333,932	97.42
	Realisasi penyediaan operasional dan pemeliharaan kantor (Layanan)	1	1	1	1,836,163,000	1,790,885,913	97.53
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumn Perencanaan yang disusun(dokumen)	1	1	100	524,801,000	521,734,61	99.42
Manajemen Keuangan Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah laporan keuangan yang disusun(dokumen)	1	1	100	9.160.000	9.160.000	100
Manajemen BMN Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah laporan keuangan yang disusun(dokumen)	1	1	100	31.074.000	31.016.500	99.81
Layanan Sarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (unit)	59	59	100	566,019,000	552,411,860	97.60
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (unit)	156	156	100	388,870,000	368,941,675	94.88
Layanan Prasarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM	Jumlah Kelanjutan pembangunan gedung dan bangunan(Unit)	2	2	Unit	1,352,769,000	1,265,781,356	93.57
Layanan Manajemen SDM	Jumlah Data Pegawai yang disusun (orang)	16	16	100	965,054,000	935,939,220	96.98



Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah laporan Monev yang disusun (dokumen)	1	1	100	177,192,000	169,003,918	95.38
Layanan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan yang telah mengikuti pelatihan	1427	1775	124	8,301,410,000	8,301,410,000	98.93

B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan salah satu acuan untuk mengukur capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. IKU Balai Diklat Hukum dan HAM telah ditentukan dalam perjanjian kinerja bersama BPSDM Hukum dan HAM.

Untuk realisasi janji kinerja tahun 2022 yang terdiri dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90 %	93 %	103 %
Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92 %	140 %	155
	4. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92 %	98 %	106 %
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah	90 %	93 %	103 %



Tabel 7. Hasil Capaian Output Pelatihan Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas capaian output Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara di Tahun 2022 adalah **1775** peserta pelatihan yang terdiri dari 9 Jenis pelatihan dan 45 angkatan dengan jumlah kelulusan **100 %**.

No	Nama Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Capaian
1.	Pelatihan Protokoler Metode Klasikal	2	60	60	-	100 %
2.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Metode Klasikal	1	40	40	-	100 %
3.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Metode Pelatihan Jarak Jauh	1	40	40	-	100 %
4.	Pelatihan Teknis Pendetensian dan Deportasi Metode Jarak Jauh	1	40	40	-	100 %
5.	Pelatihan Kehumasan Metode Klasikal	1	30	30	-	100 %
6.	Pelatihan Kesamaptaan Metode Klasikal	5	200	200	-	100 %
7.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Metode Klasikal	2	80	80	-	100 %
8.	Pelatihan Manajemen Resiko Metode Klasikal	2	80	80	-	100 %
9.	Pelatihan Dasar CPNS Metode Pelatihan Jarak Jauh	30	1205	1205	-	20 ¹ 100 %
Jumlah		45	1775	1775	-	100%



Tabel 8. Hasil Capaian Output Non Pelatihan Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2022

No	Nama Pelatihan	Output	Capaian
1.	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima Bagi Pegawai Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Melalui Sinergitas Dengan Badiklat Keagamaan Manado	13 org	Terlaksana
2.	Kegiatan COP (Community of Practice) Dalam Rangka Mewujudkan Sinergitas Kehumasan UPT Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation Pada Jaringan Kanwil Kemenkumham Sulut	92 org	Terlaksana
3.	FGD Synchronisasi Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Tahun 2022	45 org	Terlaksana
4.	Bimtek Pengelolaan Kinerja Pegawai	150 org	Terlaksana
5.	Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	40 org	Terlaksana
6.	Uji Potensi dan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut	60 org	Terlaksana
Jumlah		400 org	

Berdasarkan tabel diatas di Tahun 2022 Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara kegiatan pengembangan kompetensi lainnya untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah kerja Balai Diklat Sulut dengan output 400 org.



C. Analisa Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Diklat Hukum dan HAM merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran. Dengan cara tersebut, didapatkan angka Efisiensi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan berpedoman pada data yang diinput melalui aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran. Berikut nilai Efisiensi Anggaran Balai Diklat Hukum dan HAM tahun 2022 :

Grafik 3 Capaian Kinerja Pada Aplikasi SmArt DJA



Sumber: SMART Kemenkeu (10 Januari 2023)

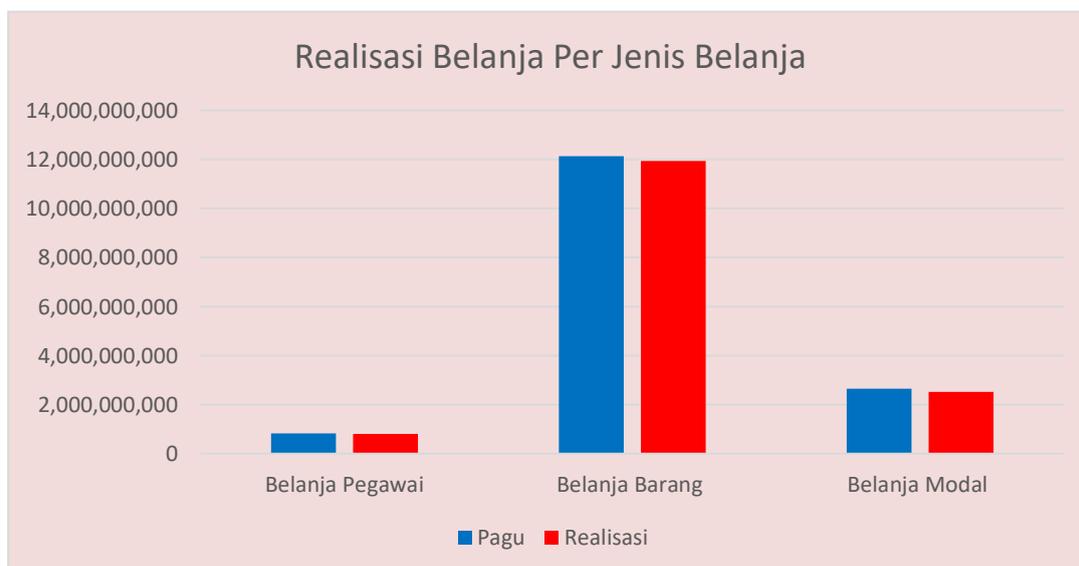


Grafik pada Aplikasi SMART DJA di atas memberikan informasi terkait Nilai Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara yaitu sebesar 96.01 atau Sangat Baik, dengan efisiensi dan nilai efisiensi sebesar 20 dan 100. Capaian ini menunjukkan bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga dapat memenuhi capaian output bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Realisasi Om Span Kementerian Keuangan, dapat dilihat pada tabel berikut :

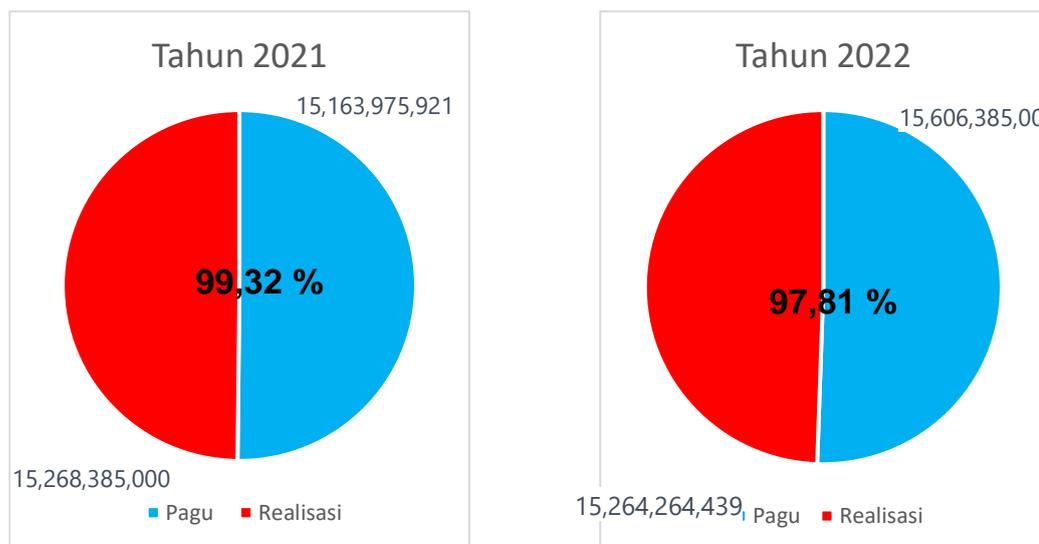
Grafik 4 Penyerapan Anggaran Tahun 2021



Berdasarkan tabel realisasi anggaran perjenis belanja diatas, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp. 15,264,264,439,- atau **97,81%** dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun 2022 sebesar 15,606,385,000. Capaian Balai Diklat Hukum dan HAM menunjukkan mampu melakukan penyerapan anggaran di atas 95% sesuai penyerapan anggaran yang ditargetkan walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **99,32 %** .



Grafik 5 Penyerapan Anggaran Tahun 2021



Adapun beberapa permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut di Tahun 2022 yaitu :

1. Adanya Automatic Adjustmen di awal Tahun anggaran yang mengakibatkan perubahan di metode pelatihan.
2. Adanya perbedaan pelaksanaan kegiatan dengan kalender kerja yang direncanakan sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan target penyerapan
3. Di Tahun 2022 Badiklat Hukum dan HAM Sulut melakukan 15 kali revisi anggaran, 4 kali revisi DIPA dan 11 kali revisi POK
4. Terdapat sisa anggaran yang berasal dari sisa anggaran kontrak belanja modal.
5. Masih terdapat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu sehingga menunda realisasi anggaran.

Untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran yang bertujuan pada penilaian IKPA maka secara rutin pimpinan melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran setiap minggu.

Demikian juga dalam rangka monitoring dan pengawasan pelaksanaan anggaran terhadap satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM selaku Unit eselon I dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara juga melakukan pendampingan dan pembinaan baik melalui rapat virtual maupun secara langsung.



C. Kendala Atau Hambatan

Kendala yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Di tahun 2022 pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu klasikal dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan tetap memperhatikan perkembangan penularan wabah covid 19 dan penerapan protokol kesehatan, hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Untuk metode pelatihan Jarak Jauh (PJJ) kendala yang paling sering ditemui oleh peserta, penyelenggara dan tenaga pengajar yaitu dengan gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik. Letak geografis satuan kerja dan kondisi cuaca menjadi penyebab gangguan tersebut. Sehingga saat melakukan pembelajaran daring menggunakan zoom meeting, beberapa peserta sampai ada yang harus pindah ke beberapa lokasi karena ditempat tinggalnya terputus jaringan dan terjadi pemadaman listrik. Sedangkan untuk klasikal masih menggunakan anggaran sewa dan biaya tiket yang melonjak tinggi. Sehingga harus beberapa kali melakukan revisi anggaran.
2. Peserta yang mengikuti pelatihan sering kali masih melaksanakan tugas yang diberikan atasan sedangkan dalam surat pemanggilan peserta sudah menyebutkan untuk membebas tugaskan para peserta dari rutinitas pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pembelajaran;
3. Beberapa mata pelatihan di Pelatihan Teknis yang memerlukan praktik dan visitasi lapangan namun tidak dapat dilakukan di pelatihan dengan metode PJJ, kami menyiasatinya dengan diganti menjadi simulasi peragaan oleh tenaga pengajar namun hal ini dirasa masih kurang efektif;
4. Masih kurangnya petugas kelas (*host*) pada pelaksanaan pelatihan Jarak jauh Latsar CPNS sehingga pemantauan dan evaluasi kurang maksimal. Hal itu disebabkan karena jumlah SDM pada Balai Diklat Hukum dan HAM yang masih sedikit.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pelatihan di wilayah, Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Target sasaran kegiatan Tahun 2022 dalam dokumen perjanjian kinerja dengan telah terealisasi sesuai dengan target.
- Persentase realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar **97,81** % atau turun **1,51** % dari tahun 2022 sebesar 99,32 %.
- Capaian Output pelatihan Tahun 2022 sebanyak **2400** orang ini menunjukkan penurunan output dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 3.605 orang. Perbedaan jumlah output tersebut karena pada tahun 2022 ini untuk peserta Pelatihan Dasar CPNS tidak wajib mengikuti pelatihan elearning MTSL dan RB seperti tahun 2021.
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 **91,54**
- Nilai SMART DJA Tahun 2022 **96,01**
- Nilai e-monev Bapennas **97,1**



B. Rencana Tindak lanjut

Adapun rencana tindak lanjut terhadap hambatan/permasalahan yang ada, yaitu :

1. Perlu adanya penegasan kembali kepada peserta, bahwa pelatihan yang dilakukan secara distance learning/ pembelajaran jarak jauh memiliki aktifitas yang sama halnya dengan pelatihan secara klasikal, dimana peserta dituntut untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran mulai dari tatap muka secara virtual, penugasan, hingga evaluasi pembelajaran sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut.
2. Secara aktif atasan/pimpinan pada unit/satuan kerja melakukan pengawasan serta memberikan dukungan fasilitas kepada pegawainya yang sedang mengikuti pelatihan agar dalam pelaksanaan pelatihan pegawai dapat menyelesaikan dengan hasil yang terbaik.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana realisasi anggaran disetiap triwulan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan metode yang disusun.
4. Adanya penambahan SDM/pegawai di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sesuai dengan kebutuhan guna meningkatnya kinerja organisasi.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ju Lotje Olga
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Kumia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM

Asep Kumia
NIP. 196611191986031001

Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Utara

Ju Lotje Olga
NIP. 196410201985032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	3. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	85%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92%
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	1. Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	90%



Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 30.606.385.000,-
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 30.606.385.000,-

Jakarta, 03 Januari 2022

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM</p>  <p>Asep Kurnia NIP. 196611191986031001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara</p>   <p>Ju Lotje Olga NIP. 196410201985032001</p>
--	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : ~~Kepala Balai Diklat~~ Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ~~Asep Kurnia~~
Jabatan : ~~Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia~~ Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

~~Bitung, 2 Januari 2023~~

Pihak Kedua,
~~Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia~~ Hukum dan HAM

Pihak Pertama,
~~Kepala Balai Diklat~~ Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

~~Asep Kurnia~~
NIP 196611191986031001

Wahju Prihandono
NIP 197210081999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang mendapat kinerjanya	80% 95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna 2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90% 93% 93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	92%



No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	94%



No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	8
		2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	354
		3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	402
		4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung	100
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2
		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2
4.	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		Rp. 12.466.288.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 2.159.249.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 3.000.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 6.824.872.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 482.167.000,-

Bitung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Asep Kurnia
NIP 196811191996031001

Wahju Prihandono
NIP 197210081999031001

